

DESENTRALISASI KEBIJAKAN DAN KURIKULUM KONTEKSTUAL: SOLUSI INOVATIF UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SDN 01 BENTENG PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI

Weni Yulastri¹, Ria Pratiwi², Tri Wahyuni³, Ramajenur Anas⁴, Suci Rahmadhani⁵, Aditya Firdaus⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Pendidikan Dasar S2, Universitas Adzkia

e-mail: weniyulastri@adzkia.ac.id¹, riapратиwi55@guru.sd.belajar.id², triwahyuni90@guru.sd.belajar.id³, ramajenuranas56@guru.sd.belajar.id⁴, sucirahmadhani24@guru.sd.belajar.id⁵, aditfirdaus1707@gmail.com⁶.

ABSTRACT

The educational issues at SDN 01 Benteng Pasar Atas in Bukittinggi City demonstrate the dominance of a centralistic approach in policy-making and a lack of involvement from teachers and students in curriculum development. This study aims to analyze these issues and propose solutions based on policy decentralization and the development of contextual and adaptive curricula. Using a literature review method, this study examines both national and international literature. The analysis results indicate that involving local stakeholders, utilizing technology, and adopting active learning approaches can significantly enhance the quality of education at the elementary school level.

Keywords: policy decentralization, contextual curriculum, teacher participation, education policy, SDN 01 Benteng Pasar Atas.

ABSTRAK

Masalah pendidikan di SDN 01 Benteng Pasar Atas Kota Bukittinggi menunjukkan dominasi pendekatan sentralistik dalam pengambilan kebijakan serta kurangnya keterlibatan guru dan siswa dalam penyusunan kurikulum. Kajian ini bertujuan menganalisis permasalahan tersebut dan menawarkan solusi berbasis desentralisasi kebijakan serta pengembangan kurikulum kontekstual dan adaptif. Dengan metode kajian pustaka, studi ini menelaah literatur nasional dan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelibatan pemangku kepentingan lokal, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan pembelajaran aktif dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan di tingkat sekolah dasar.

Kata Kunci: desentralisasi kebijakan, kurikulum kontekstual, partisipasi guru, kebijakan pendidikan, SDN 01 Benteng Pasar Atas.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membentuk generasi yang berdaya saing tinggi dan

berkarakter kuat. Di tingkat sekolah dasar, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk

menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan keterampilan dasar yang esensial dalam kehidupan siswa. Dalam konteks ini, peran kebijakan pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pendidikan yang diterapkan secara nasional kerap tidak selaras dengan kebutuhan lokal, terutama di sekolah-sekolah dasar yang berada di daerah.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh banyak satuan pendidikan di Indonesia, termasuk SDN 01 Benteng Pasar Atas Kota Bukittinggi, adalah dominannya pendekatan sentralistik dalam pengambilan keputusan. Sentralisasi kebijakan menyebabkan semua keputusan strategis—baik dalam pengembangan kurikulum, pengelolaan anggaran, hingga penilaian hasil belajar—ditentukan dari pusat tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Akibatnya, sekolah memiliki ruang gerak yang terbatas dalam berinovasi dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial budaya, potensi, dan tantangan yang dihadapi.

Dampak nyata dari kondisi tersebut adalah rendahnya partisipasi guru dan siswa dalam proses penyusunan kurikulum. Kurikulum yang diterapkan cenderung seragam dan tidak memperhitungkan keunikan karakteristik peserta didik maupun lingkungan sosial mereka. Guru hanya berperan sebagai pelaksana teknis kurikulum, bukan sebagai pengembangnya. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi kaku, tidak kontekstual, dan kehilangan makna. Siswa pun cenderung pasif, karena materi pelajaran tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka,

sehingga menurunkan motivasi dan keterlibatan aktif dalam belajar.

Padahal, partisipasi aktif dari guru dan siswa dalam perencanaan pendidikan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di sekolah. Ketika guru memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam pengembangan kurikulum, maka mereka akan merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pembelajaran. Begitu pula dengan siswa, jika materi yang dipelajari relevan dengan kehidupan mereka, maka minat belajar dan prestasi cenderung meningkat. Sayangnya, pendekatan kebijakan yang top-down masih mendominasi praktik pendidikan di berbagai jenjang.

Reformasi pendidikan yang telah digulirkan pemerintah melalui Kurikulum Merdeka sebetulnya memberikan peluang bagi sekolah untuk lebih fleksibel dalam menyusun kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik. Namun, implementasi kurikulum ini belum optimal, terutama di sekolah-sekolah yang belum mendapatkan pelatihan memadai atau akses terhadap sumber daya yang cukup. Kurangnya pemahaman guru terhadap filosofi dan teknis penerapan Kurikulum Merdeka menjadi salah satu kendala utama. Akibatnya, meskipun kurikulum ini menjanjikan kebebasan belajar, dalam pelaksanaannya belum menunjukkan perubahan signifikan di lapangan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendekatan desentralisasi kebijakan pendidikan menjadi solusi yang patut dipertimbangkan. Desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dengan mengadopsi pendekatan bottom-up, sekolah dapat

berperan sebagai pengambil keputusan strategis, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat. Hal ini mendorong munculnya inovasi lokal yang lebih relevan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Lebih lanjut, pengembangan kurikulum yang bersifat kontekstual dan adaptif merupakan kunci dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berdaya guna. Kurikulum kontekstual mengintegrasikan materi pelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik, lingkungan sekitar, dan potensi daerah. Kurikulum ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat lokal sangat diperlukan agar kurikulum benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai lokal yang ingin dikembangkan.

Selain reformasi kebijakan dan kurikulum, inovasi dalam proses pembelajaran juga diperlukan. Penggunaan pendekatan pembelajaran aktif seperti Project-Based Learning (PjBL) dan Problem-Based Learning (PBL) terbukti efektif dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Pendekatan ini juga memperkuat pembelajaran mandiri, karena siswa terlibat langsung dalam proses eksplorasi dan pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka.

Tidak kalah pentingnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus menjadi bagian dari strategi inovasi pendidikan. Dengan infrastruktur dan pelatihan yang memadai, TIK dapat membantu meningkatkan akses terhadap sumber belajar, memperluas

jangkauan pembelajaran, serta mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel. Kebijakan yang mendukung integrasi TIK dalam pembelajaran harus dirumuskan secara jelas dan komprehensif agar tidak menjadi beban tambahan bagi guru maupun siswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kebijakan pendidikan yang terjadi di SDN 01 Benteng Pasar Atas Kota Bukittinggi, mengkaji akar penyebabnya, serta menawarkan solusi berupa desentralisasi kebijakan dan pengembangan kurikulum kontekstual sebagai strategi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Artikel ini juga akan membahas langkah-langkah konkret dalam merumuskan kebijakan berbasis sekolah yang partisipatif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research), yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi melalui studi terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Pendekatan ini sangat tepat digunakan dalam menganalisis kebijakan pendidikan karena mampu menggali teori-teori, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis literatur yang komprehensif. Metode ini mengacu pada pendekatan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019), yaitu bahwa kajian pustaka dilakukan sebagai bagian dari studi kualitatif dengan mengkaji informasi dari berbagai referensi untuk menyusun landasan konseptual dan argumentasi

yang kuat terhadap permasalahan yang diteliti.

Langkah awal dalam kajian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan, yaitu dominasi kebijakan sentralistik dan rendahnya partisipasi guru serta siswa dalam penyusunan kurikulum. Masalah tersebut dianalisis secara teoritik berdasarkan studi literatur dari jurnal nasional, jurnal internasional, buku ilmiah, serta laporan kebijakan dari institusi pendidikan resmi seperti Kemendikbudristek. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang akar penyebab, dampak, dan potensi solusi terhadap masalah tersebut.

Selanjutnya, peneliti mengumpulkan sumber pustaka sekunder dari berbagai database ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, ResearchGate, serta e-journal perguruan tinggi, yang memuat topik-topik terkait desentralisasi pendidikan, kurikulum kontekstual, partisipasi pemangku kepentingan, dan inovasi pembelajaran berbasis proyek. Kriteria inklusi sumber pustaka adalah literatur yang terbit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2013–2025), memiliki relevansi tematik dengan kebijakan pendidikan dasar, serta berasal dari sumber yang memiliki kredibilitas akademik.

Proses selanjutnya adalah analisis isi (content analysis) terhadap dokumen dan literatur yang dikumpulkan. Analisis dilakukan untuk menyusun sintesis argumentatif yang dapat menjawab rumusan masalah, yakni bagaimana penerapan desentralisasi dan kurikulum kontekstual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 01 Benteng Pasar Atas. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema, seperti: (1)

permasalahan kebijakan sentralistik, (2) konsep desentralisasi dan otonomi sekolah, (3) urgensi kurikulum kontekstual, dan (4) inovasi pembelajaran yang mendukung kemandirian belajar siswa.

Selain itu, peneliti juga melakukan evaluasi kritis terhadap hasil temuan dari sumber pustaka yang digunakan. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat konsistensi, keabsahan argumen, dan kontribusi masing-masing teori atau hasil penelitian terhadap konteks SDN 01 Benteng Pasar Atas Kota Bukittinggi. Dari hasil evaluasi ini, kemudian dirumuskan kerangka rekomendasi kebijakan yang logis, aplikatif, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Metode kajian pustaka ini memberikan fleksibilitas dan keluasan dalam mengeksplorasi isu-isu kebijakan pendidikan, karena tidak terbatas pada satu lokasi atau responden. Dengan menggabungkan berbagai pandangan ilmiah dari dalam dan luar negeri, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif pemecahan masalah dan memberikan kontribusi nyata dalam praktik kebijakan di tingkat sekolah dasar, khususnya dalam mewujudkan sistem pembelajaran yang desentralistik, partisipatif, dan kontekstual.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Sentralisasi Pengambilan Keputusan sebagai Akar Masalah

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang sentralistik. Di SDN 01 Benteng Pasar Atas, hampir seluruh kebijakan penting, mulai dari kurikulum, evaluasi, hingga manajemen sekolah—ditentukan oleh pihak

otoritatif di tingkat pusat atau daerah, tanpa adanya ruang partisipatif dari warga sekolah. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara kebijakan dan kebutuhan lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Cornito (2021), sistem sentralisasi menghambat fleksibilitas satuan pendidikan dalam merespons dinamika sosial dan budaya setempat, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas implementasi kebijakan di sekolah.

Kondisi ini menimbulkan dua persoalan utama: rendahnya rasa kepemilikan terhadap kebijakan di kalangan guru dan siswa, serta terbatasnya kreativitas dalam praktik pembelajaran. Ketika kepala sekolah dan guru hanya bertugas sebagai pelaksana teknis, maka inovasi sulit tumbuh, dan program pendidikan cenderung hanya menjadi formalitas administratif.

Kurangnya Keterlibatan Guru dan Siswa dalam Penyusunan Kurikulum

Di lingkungan SDN 01 Benteng Pasar Atas, kurikulum masih dipahami sebagai dokumen baku yang harus diikuti, bukan sebagai alat adaptif untuk merancang pembelajaran sesuai konteks lokal. Hal ini menyebabkan minimnya inisiatif dari guru dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan realitas siswa. Kurangnya pelibatan siswa juga menjadikan materi pelajaran terasa asing dan tidak bermakna. Martinez (2022) menegaskan bahwa partisipasi siswa dan guru dalam pengembangan kurikulum dapat meningkatkan relevansi materi ajar sekaligus membentuk lingkungan belajar yang partisipatif.

Kurikulum Merdeka sebetulnya memberi ruang besar untuk hal ini, tetapi pada kenyataannya, banyak

guru yang belum memahami sepenuhnya filosofi dan strategi implementasinya. Kurangnya pelatihan dan pendampingan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara ide besar kebijakan dan realitas pelaksanaannya di sekolah.

Desentralisasi Kebijakan sebagai Strategi Efektif

Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, desentralisasi pendidikan menawarkan solusi struktural yang memberikan wewenang lebih besar kepada sekolah. Dengan pendekatan bottom-up, SDN 01 Benteng Pasar Atas berpotensi menjadi aktor utama dalam perumusan kebijakan pendidikan lokal yang lebih adaptif. Setyaningsih (2017) menjelaskan bahwa transformasi dari sistem sentralistik menuju desentralistik memungkinkan sekolah untuk menyusun program berdasarkan evaluasi kebutuhan nyata.

Dalam konteks ini, kepala sekolah perlu mendorong forum musyawarah internal yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penggunaan sistem informasi manajemen berbasis digital juga penting sebagai dasar pengambilan kebijakan yang akurat dan transparan (Sumbaryani et al., 2023). Sekolah tidak hanya akan menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga perancang kebijakan berbasis bukti.

Kurikulum Kontekstual dan Adaptif untuk Pembelajaran Bermakna

Pengembangan kurikulum yang bersifat kontekstual dan adaptif merupakan jawaban atas tantangan implementasi kurikulum nasional yang terlalu umum. Di SDN 01 Benteng Pasar Atas, integrasi antara kurikulum dan kondisi lokal dapat dilakukan

dengan melibatkan nilai budaya, potensi daerah, serta pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan gagasan Nurphi (2024) yang menekankan pentingnya fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan proses belajar dengan realitas sosial peserta didik.

Pendekatan Project-Based Learning (PjBL) dan Problem-Based Learning (PBL) menjadi metode yang sangat sesuai dalam konteks ini. Selain meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kedua pendekatan ini mendorong siswa untuk menyelesaikan persoalan nyata di sekitarnya secara kolaboratif. Abda & Salsabilla (2023) dan Ningrum et al. (2024) membuktikan bahwa kedua pendekatan tersebut mampu meningkatkan motivasi, kreativitas, dan keterampilan sosial siswa secara signifikan.

Inovasi Kebijakan untuk Mewujudkan Pembelajaran Mandiri

Sebagai bagian dari transformasi kebijakan, SDN 01 Benteng Pasar Atas dapat mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi, sumber belajar terbuka, dan keterampilan metakognitif siswa. Integrasi teknologi ke dalam proses belajar memungkinkan siswa mengakses materi kapan saja dan menyesuaikan gaya belajar mereka secara mandiri (Aziz & Zakir, 2022). Pengembangan literasi informasi dan pembelajaran reflektif juga penting agar siswa dapat merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi proses belajarnya sendiri (Febrina & Mukhidin, 2019).

Langkah-langkah konkret yang dapat diambil antara lain: menyediakan akses perpustakaan digital, melatih guru dalam penggunaan Learning Management

System (LMS), dan menerapkan sistem evaluasi formatif yang memberi umpan balik terus-menerus. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada penguatan karakter, kemandirian, dan keterampilan belajar sepanjang hayat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kebijakan pendidikan yang terjadi di SDN 01 Benteng Pasar Atas Kota Bukittinggi merupakan cerminan dari persoalan sistemik dalam tata kelola pendidikan nasional yang masih bersifat sentralistik. Dominasi pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan menyebabkan sekolah memiliki ruang gerak yang sangat terbatas dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi kurang adaptif, bersifat seragam, dan tidak responsif terhadap kondisi sosial, budaya, serta potensi peserta didik.

Kurangnya pelibatan guru dan siswa dalam penyusunan kurikulum juga berdampak langsung pada rendahnya relevansi pembelajaran terhadap kehidupan nyata peserta didik. Guru sering kali hanya menjalankan peran sebagai pelaksana teknis tanpa dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum, sementara siswa tidak diberikan ruang untuk menyuarakan kebutuhan belajar mereka. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi kaku, membosankan, dan kehilangan makna, sehingga menurunkan motivasi dan partisipasi aktif siswa.

Sebagai solusi, pendekatan desentralisasi kebijakan pendidikan perlu didorong secara sistematis untuk memberikan otonomi lebih

besar kepada satuan pendidikan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Penerapan pendekatan bottom-up dalam pengambilan keputusan, pelibatan komunitas sekolah, serta pemanfaatan data berbasis teknologi informasi akan memperkuat akuntabilitas dan efektivitas kebijakan di tingkat sekolah.

Di samping itu, pengembangan kurikulum yang kontekstual dan adaptif menjadi strategi utama dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Kurikulum harus dikaitkan dengan lingkungan sekitar peserta didik, potensi lokal, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Penerapan metode Project-Based Learning dan Problem-Based Learning terbukti meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kerja sama, dan kreativitas siswa, sekaligus memperkuat pembelajaran berbasis pengalaman.

Inovasi kebijakan di tingkat sekolah juga sangat penting untuk mendukung proses belajar yang mandiri dan reflektif. Integrasi teknologi dalam pembelajaran, pengembangan perpustakaan digital, pelatihan guru dalam penggunaan sistem digital dan pendekatan pembelajaran aktif, serta pembentukan budaya literasi informasi merupakan langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh.

Dengan demikian, solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 01 Benteng Pasar Atas Kota Bukittinggi tidak hanya terletak pada reformasi kurikulum, tetapi juga pada transformasi tata kelola kebijakan pendidikan menuju arah yang lebih partisipatif, fleksibel, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Sinergi

antara guru, siswa, kepala sekolah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem pendidikan dasar yang berdaya saing, inklusif, dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- Abda, Y., & Salsabilla, T. (2023). Hubungan penggunaan model Project Based Learning terhadap hasil belajar IPAS siswa kelas IV Sekolah Dasar. *Jurnal Handayani*, 14(2).
- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). Integrasi teknologi dalam pendidikan: Tantangan dan peluang pembelajaran digital di Sekolah Dasar. *Indonesian Research Journal on Education*, 2(3), 1030–1037.
- Cornito, C. M. (2021). Striking a balance between centralized and decentralized decision making: A school-based management practice for optimum performance. *International Journal on Social and Education Sciences*, 3(4), 656–669.
- Fadholi, A., & Wahidah, N. (2025). Efektivitas pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PAI: Analisis literatur terhadap tantangan era digital. *An-Nadwah: Journal Research on Islamic Education*, 1(1), 39–50.
- Febrina, E., & Mukhidin. (2019). Metakognitif sebagai keterampilan berfikir tingkat tinggi pada pembelajaran abad 21. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 6(1), 25–32.
- Martinez, C. (2022). Developing 21st century teaching skills: A case study of teaching and learning through project-based curriculum. *Cogent Education*, 9(1).
- Ningrum, A. K. P., Novaliyosi, & Nindiasari, H. (2024). Systematic

- literature review: Model Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. *Jurnal Educatio*, 10(3), 873–880.
- Nurphi, M. (2024). Menggali dampak penerapan Kurikulum Merdeka: Tinjauan antara harapan dan realitas. *Mauriduna*, 5(2), 462–479.
- Raharjo Jati, W. (2013). Mengurai gagasan negara pascakolonial: Kontekstualisasi Indonesia sebagai negara dunia ketiga. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 133.
- Rahminawati, N. (2023). Manajemen pendidikan. *Manajemen Pendidikan*, April.
- Ramadhani, S. A., Triwiyanto, T., Eri, D., & Kunci, K. (2025). Pengaruh program manajemen hubungan masyarakat dan tingkat keterlibatan orang tua terhadap mutu pendidikan taman kanak-kanak di Kota Batu. *Proceedings Series of Educational Studies*.
- Setyaningsih, K. (2017). Esensi transformasi sistem sentralisasi-desentralisasi pendidikan dalam pembangunan masyarakat. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 76–94.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumbaryani, I. R., Sutanara, F., & Ranahcita, R. N. (2023). Peran sistem informasi manajemen sekolah dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan evaluasi pembelajaran. *Jurnal Literasi Digital*, 3(2), 89–98.
- Syarifuddin, S., Rahmattullah, R., & Akmaluddin, A. (2024). Efektivitas penggunaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri dalam peningkatan mutu pendidikan berdasarkan model CIPP di Kabupaten Aceh Besar. *Visipena*, 15(1), 53–74.